

**THE ROLE OF HUMAN RESOURCES IN CREATING THE RELIABILITY
OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORT
IN KARANGANYAR DISTRICT**

Peran Sumber Daya Manusia Dalam Pembentukan Reliabilitas Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah Di Kabupaten Karanganyar

Vernanda Vivian Juwita Sari
Universitas Kristen Duta Wacana

Maharani Dhian Kusumawati
Universitas Kristen Duta Wacana

ABSTRACT

Local government financial report is a tool of accountability to the central government and community. This study aims to examine the role of human resources in each Organisasi Perangkat Daerah (OPD) in Karanganyar District of Central Java Province in producing reliable financial report. The role of human resources is tested through 4 indicators namely human resource capacity, organizational commitment, understanding of local financial accounting system and government internal control system. This study uses a qualitative method. Data collected by distributing questionnaires to 43 OPD of Karanganyar District Government with measurement from two different sides for independent and dependent variable. Independent variable questionnaire is given to local finance officers in 43 OPD as OPD's financial report maker. The dependent variable questionnaire is given to accounting staff of Badan Keuangan Daerah as auditor of OPD's financial report and local government financial reporting maker. The results of this study indicate that human resource capacity has no effect on the reliability of local government financial report, while organizational

commitment, understanding of local financial accounting systems and internal government control systems have positive effect on reliability of local governments financial report.

Keyword: *local government financial report, reliability, human resource capacity, organizational commitment, understanding of local financial accounting system, government internal control systems, and Karanganyar district*

ABSTRAKSI

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan alat pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran sumber daya manusia di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal. Peran sumber daya manusia diuji melalui 4 indikator yaitu kapasitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 43 OPD Kabupaten Karanganyar dengan pengukuran dari dua sisi yang berbeda untuk variabel independen dan dependen. Daftar pertanyaan variabel independen diberikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah di 43 OPD sebagai pembuat laporan keuangan OPD. Sedangkan daftar pertanyaan variabel dependen diberikan kepada pegawai bagian akuntansi Badan Keuangan Daerah sebagai pemeriksa laporan keuangan OPD dan pembuat laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan komitmen organisasi, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: laporan keuangan pemerintah daerah, keandalan, kapasitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, kabupaten karanganyar

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan tentang keuangan daerah.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 294 sampai dengan pasal 296, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan gabungan laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dan disampaikan kepada kepala daerah untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Laporan keuangan pemerintah daerah akan mendapat penilaian berupa opini dari badan pemeriksa keuangan (BPK) setiap tahunnya.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017 yang disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikutip dari laman resmi BPK RI (www.bpk.go.id) menyatakan bahwa terhadap 537 LKPD Tahun 2016 yang diperiksa, BPK hanya memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 375 entitas, opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 139 entitas, dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) sebanyak 23 entitas. Meskipun dari data hasil pemeriksaan BPK selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan untuk LKPD dengan opini WTP, namun masih banyak juga OPD yang melakukan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Pemerintah dituntut menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan berkualitas yang harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Salah satu karakteristik kualitas informasi adalah keandalan. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut, keandalan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut adalah informasi yang bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, netral, dapat diuji serta dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang jujur.

Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu pemerintah daerah yang dituntut menghasilkan laporan keuangan daerah yang andal. Berdasarkan wawancara dengan pegawai akuntansi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar terdapat kendala dalam upaya penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang andal. Banyak OPD yang melakukan kesalahan dalam bentuk *inputting* dan tidak adanya pengungkapan secara penuh. Laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Laporan keuangan OPD yang telah dikumpulkan kepada bagian akuntansi BKD akan diteliti dan dicek terlebih dahulu untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun dengan benar sebelum laporan keuangan OPD tersebut dikonsolidasi menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Ketika PPKD melakukan kesalahan dalam menyusun laporan keuangan OPD, maka pegawai bagian akuntansi BKD akan mengembalikan laporan keuangan OPD tersebut dengan beberapa catatan revisi atas kesalahan yang dilakukan dan meminta PPKD agar segera memperbaiki kesalahan tersebut dan mengembalikan kembali laporan keuangan OPD yang sudah diperbaiki.

Kendala ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis terdorong untuk meneliti faktor-faktor yang berkaitan dengan peran sumber daya manusia di Kabupaten Karanganyar dalam menghasilkan laporan keuangan daerah yang andal. Beberapa penelitian terdahulu menemukan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan daerah yaitu oleh Sudiarianti (2015) yang menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, Maksyur (2015) menemukan bahwa komitmen organisasi yang dilakukan pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Indragiri Hulu terbukti berpengaruh terhadap kualitas yaitu ketepatan waktu dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Selain itu, Andini dan Yusrawati (2015) menemukan hasil bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas yaitu ketepatan waktu dan keandalan laporan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Ditemukan juga beberapa faktor yang terkait dengan karakteristik pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu sistem pengendalian internal pemerintah pemerintah (SPIP) dilakukan oleh Zalni (2013) pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah di Kota Bengkulu terbukti berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan OPD pemerintah Kota Bengkulu.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis mengelompokkan faktor-faktor tersebut menjadi 2 kelompok, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dalam diri pegawai yang diduga berpengaruh dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah agar dapat diandalkan. Faktor internal yang diteliti yaitu kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan komitmen organisasi. Kapasitas SDM mencakup aspek kompetensi yang dimiliki pegawai dalam hal pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan, pelatihan dan pengalaman yang dimiliki. Sedangkan, komitmen organisasi merupakan tingkat kepemihakan pegawai pada organisasi yang mengacu pada sikap loyal pegawai demi pencapaian tujuan organisasi. Faktor eksternal muncul dari situasi atau kondisi instansi pemerintahan dimana individu bekerja. Sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakan adalah sama hanya saja pemahaman individu atas sistem tersebut yang berbeda dan akan menimbulkan kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Disamping itu, guna memperoleh pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien diperlukan sistem pengendalian internal pemerintah.

Penelitian ini akan dilakukan pada 43 OPD di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis peranan sumber daya manusia yang diwakili oleh faktor internal yaitu kapasitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi; serta faktor eksternal yaitu pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Responden dalam penelitian adalah pejabat pengelola keuangan daerah dari 43 OPD dan pegawai bagian akuntansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1) Teori Keagenan

Dalam organisasi sektor publik terutama pemerintah daerah, teori keagenan telah dipraktikkan dalam menyusun APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah (Pagalung, 2008). Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat dan membuka akses bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif (agen) cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang menimbulkan hal negatif dalam bentuk perilaku oportunistik dan cenderung tidak menyukai resiko untuk menghindari resiko berupa ketidakpercayaan prinsipal terhadap kinerja mereka.

2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010), jenis-jenis organisasi sektor publik dibagi menjadi tiga yaitu (1) instansi pemerintah meliputi pemerintah pusat serta lembaga dan badan negara, (2) pemerintah daerah, dan (3) organisasi nirlaba milik pemerintah. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi serta merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Pemerintah daerah wajib menggunakan basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca, sedangkan basis kas digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas (Sugiyono, 2015). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 294 sampai dengan pasal 296, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan gabungan laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai laporan pertanggungjawaban atas anggaran dan akan disampaikan kepada kepala daerah untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

3) Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Karakteristik yang disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan tersebut merupakan prasyarat agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas informasi yang dikehendaki. Keempat karakteristik yaitu: (a) Relevan yang mencakup memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu, dan lengkap; (b) Andal yang mencakup penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), dan netralitas; (c) Dapat dibandingkan; (d) Dapat dipahami.

4) Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya dan mencapai kinerja yang efektif dan efisien untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Pemerintah daerah sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan, dan memiliki pengalaman serta keterampilan di bidang keuangan (Kaulan, 2015). Sumber daya manusia yang profesional akan mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi secara tuntas. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang andal. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kapasitas sumber daya manusia dengan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibangun hipotesis pertama yaitu

H1 : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah

5) Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu (Ikhsan dan Ishak, 2008). Komitmen organisasi melibatkan hubungan aktif dan keinginan karyawan untuk

memberikan kontribusi dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan dan jujur dengan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan dan kekayaan yang dikuasai serta dimiliki pemerintah daerah dengan harapan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah yang andal sesuai dengan SAP untuk kebutuhan umum (Arif, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, maka dibangun hipotesis kedua yaitu

H2 : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah

6) Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dengan demikian, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu sikap dari sumber daya manusia untuk memahami penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tersebut oleh masing-masing organisasi perangkat daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Kurangnya pemahaman akan sistem akuntansi keuangan daerah tercermin dari tingginya tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pegawai yang bekerja karena kurangnya kemampuan untuk mengetahui, menjelaskan dan menyusun proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi keuangan serta pelaporan keuangan (Khairudin, 2017). Aparatur pemerintah daerah dalam OPD yang memiliki pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang tinggi dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang andal.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibangun hipotesis ketiga yaitu

H3 : Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

7) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal, yaitu: (a) tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara; (b) keandalan pelaporan keuangan; (c) pengamanan aset negara; dan (d) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Damayanti, 2016). *Statement on Auditing Standard (SAS)* mendefinisikan lima komponen pengendalian intern yang saling berkaitan pada pernyataan COSO (Sawyer et al, 2005 dalam Sukmaningrum, 2012) yaitu: *Control environment* (lingkungan pengendalian); *Risk assessment* (penilaian risiko); *Control activities* (aktivitas pengendalian); *Information and communication* (informasi dan komunikasi); dan *Monitoring* (pemantauan).

Adanya pelaksanaan SPIP dengan baik dan benar akan memberi jaminan bahwa seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan

(Damayanti, 2016). Akhirnya, tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara terutama melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah yang andal dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

Berdasarkan uraian di atas, maka dibangun hipotesis keempat yaitu

H4 : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah

C. METODA PENELITIAN

Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan informasi dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 43 OPD Pemerintah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah. Variabel independen dan dependen diukur dari dua sisi yang berbeda sehingga kuesioner tersebut diisi oleh responden berbeda. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara penyebaran langsung kepada dinas terkait yang dilakukan selama satu bulan. Penyebaran kuesioner sebanyak 43 bendel atas variabel independen diberikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dari setiap OPD sebagai pembuat laporan keuangan OPD. Sedangkan, penyebaran kuesioner sebanyak 43 lembar atas pertanyaan variabel dependen diberikan kepada pegawai akuntansi Badan Keuangan Daerah sebagai pemeriksa atas laporan keuangan masing-masing OPD.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Keandalan laporan keuangan pemerintah daerah diukur dengan tiga indikator yang dioperasionalkan dan disajikan dalam tabel 1. Kriteria tersebut mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sudiarianti (2015) dan Triyanto (2017). Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu kapasitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Jenis	Variabel	Indikator
Variabel Independen (X)	Kapasitas Sumber Daya Manusia (X ₁)	1. Latar Belakang Pendidikan 2. Pelatihan keahlian dalam tugas 3. Pengalaman yang dimiliki 4. Uraian peran dan fungsi 5. Fungsi akuntansi 6. Sumber daya pendukung operasional.
	Komitmen Organisasi (X ₂)	1. Alasan pilihan instansi OPD 2. Peluang terbaik dari instansi OPD 3. Kepedulian terhadap instansi OPD 4. Usaha mencapai tujuan instansi OPD 5. Keterikatan emosional dengan instansi OPD 6. Tugas dan prosedur sesuai dengan standar instansi OPD 7. Sikap dalam menyelesaikan tugas.
Pemahaman Akuntansi Daerah (X ₃)	Sistem Keuangan	1. Kesesuaian dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Pengidentifikasian transaksi dan pencatatan

			3. Bukti transaksi
			4. Pencatatan transaksi secara kronologis
			5. Pengklasifikasian transaksi
			6. Sistem pengendalian dalam pencatatan
			7. Pembuatan laporan keuangan
Sistem Internal (X ₄)	Pengendalian Pemerintah		1. Kode etik instansi OPD
			2. Perilaku etis dari pimpinan
			3. Pembagian tugas dan jabatan
			4. Penentuan batas toleransi
			5. Penetapan kebijakan tugas
			6. Prosedur otorisasi dokumen transaksi
			7. Informasi dan komunikasi
			8. Pengawasan secara periodik
Variabel Dependen (Y)	Keandalan Keuangan Daerah	Laporan Pemerintah	1. Penyajian secara jujur
			2. Isi laporan keuangan dapat diverifikasi
			3. Netralitas

Analisis Data

Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan cara mengkuantitatifkan data-data penelitian ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan skala likert 5 poin (*5-point likert scale*). Keseluruhan jawaban diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu :

- Skor 5 untuk jawaban sangat setuju
- Skor 4 untuk jawaban setuju
- Skor 3 untuk jawaban netral
- Skor 2 untuk jawaban tidak setuju
- Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju

Tahap pertama yaitu uji pilot. Uji pilot dilakukan sebelum melakukan penyebaran kuesioner untuk menguji validitas dan reliabilitas atas pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Uji pilot dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan Universitas Kristen Duta Wacana. Kuesioner dibagikan kepada bendahara organisasi kemahasiswaan Fakultas Bisnis, Fakultas Arsitektur dan Desain, Fakultas Teknologi Informatika, dan Fakultas Kedokteran dengan jumlah 30 eksemplar kuesioner. Daftar pertanyaan untuk variabel independen diberikan kepada 30 bendahara organisasi Himpunan Mahasiswa (HM) Program Studi dan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas karena bendahara HM dan BEM memiliki tugas sebagai pembuat laporan keuangan organisasi dalam bentuk laporan pertanggungjawaban atas program kerja yang telah dilaksanakan. Sedangkan daftar pertanyaan variabel dependen diisi oleh bendahara Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang melakukan pemeriksaan atas 30 laporan keuangan dari organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Hasil dari uji validitas dan reliabilitas pengujian ini tidak disertakan dalam pengujian penelitian selanjutnya Uji validitas digunakan untuk mengukur sah (*valid*) atau tidak suatu kuesioner. Uji ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing butir pertanyaan terhadap total skor. Pertanyaan disebut *valid* jika r hitung positif dan r hitung $>$ r tabel. Sedangkan uji reliabilitas digunakan mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Dalam penelitian ini pengukuran reliabilitas kuesioner melalui uji statistik Cronbach Alpha (α). Ghazali (2016) menyatakan suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpa* $>$ 0,60 pada hasil pengujian.

Tahap kedua yaitu analisis korelasi Spearman Rank (*Rank Spearman's Correlation*). Analisis ini digunakan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan dan arahnya variabel independen dengan variabel dependen (Permadi, 2013). Tingkat hubungan dapat diketahui berdasarkan tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Koefisien Korelasi dan Tingkat Hubungan

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono (2015)

Tahap ketiga yaitu pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda. Variabel yang mempunyai korelasi sedang hingga sangat kuat diperhatikan nilai signifikansi dan arah koefisien pada saat regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh dan arahnya. Persamaan regresi linear berganda yang dibangun yaitu:

$$\text{KNDL} = \alpha_0 - \alpha_1.\text{SDM} + \alpha_2.\text{KO} + \alpha_3.\text{SKAD} + \alpha_4.\text{SPIP} + \epsilon$$

Keterangan:

- KNDL : Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- SDM : Kapasitas Sumber Daya Manusia
- KO : Komitmen Organisasi
- SKAD : Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- SPIP : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

D. HASIL

Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 43 eksemplar yang terdiri atas pertanyaan dari empat variabel independen untuk pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) masing-masing OPD dan 43 eksemplar pertanyaan variabel dependen untuk pegawai bagian akuntansi Badan Keuangan Daerah. Sebelum kuesioner disebarkan maka dilakukan uji pilot untuk mengetahui validitas dan reliabilitas pertanyaan dalam variabel. Berikut hasil pengujian validitas atas pertanyaan untuk masing-masing variabel:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r-hitung	r-kritis	Keterangan
Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1	0,467	0,30	Valid
	2	0,617	0,30	Valid
	3	0,749	0,30	Valid
	4	0,665	0,30	Valid
	5	-0,20	0,30	Tidak Valid
	6	0,310	0,30	Valid
	7	0,477	0,30	Valid
	8	0,421	0,30	Valid
	9	0,477	0,30	Valid
	10	0,405	0,30	Valid
	11	0,683	0,30	Valid
Komitmen Organisasi	1	0,328	0,30	Valid

Variabel	Item Pertanyaan	r-hitung	r-kritis	Keterangan
(KO)	2	0,352	0,30	Valid
	3	0,385	0,30	Valid
	4	0,541	0,30	Valid
	5	0,575	0,30	Valid
	6	0,475	0,30	Valid
	7	0,727	0,30	Valid
	8	0,483	0,30	Valid
	9	0,697	0,30	Valid
	Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	1	0,528	0,30
2		0,622	0,30	Valid
3		0,573	0,30	Valid
4		0,507	0,30	Valid
5		0,760	0,30	Valid
6		0,886	0,30	Valid
7		0,755	0,30	Valid
8		0,466	0,30	Valid
9		0,741	0,30	Valid
10		0,770	0,30	Valid
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	1	0,723	0,30	Valid
	2	0,727	0,30	Valid
	3	0,616.	0,30	Valid
	4	0,647	0,30	Valid
	5	0,563	0,30	Valid
	6	0,558	0,30	Valid
	7	0,767	0,30	Valid
	8	0,846	0,30	Valid
	9	0,662	0,30	Valid
	10	0,768	0,30	Valid
Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KNDL)	1	0,707	0,30	Valid
	2	0,593	0,30	Valid
	3	0,659	0,30	Valid
	4	0,562	0,30	Valid
	5	0,712	0,30	Valid
	6	0,795	0,30	Valid

Sumber : Output SPSS 22.0, 2018

Berdasarkan tabel 3 di atas, nilai r-hitung pada item pertanyaan variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia menunjukkan angka yang lebih besar dari r-kritis, terkecuali nilai r-hitung pada pertanyaan nomor 5 yang menunjukkan hasil tidak valid sehingga pertanyaan dihilangkan dan tidak dipergunakan. Sedangkan item pertanyaan untuk variabel yang lain dapat dinyatakan valid dan dapat dipergunakan dalam penelitian karena r-hitung lebih besar dari r-kritis. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dengan hasil pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabel	Keterangan
SDM	0,708	0,60	Reliabel
KO	0,622	0,60	Reliabel
SAKD	0,857	0,60	Reliabel

SPIP	0,876	0,60	Reliabel
KNDL	0,749	0,60	Reliabel

Sumber : Output SPSS 22.0, 2018

Berdasarkan tabel 4 tersebut, nilai *Cronbach's Alpha* dari keseluruhan variabel penelitian lebih besar dari 0.60, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner tersebut reliabel.

Tahap selanjutnya yaitu menyebarkan kuesioner kepada para responden yang telah ditetapkan.

Tabel 5. Data Penyebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	
	PPKD	Pegawai Akuntansi BKD
Kuesioner yang disebar	43	43
Kuesioner yang tidak kembali	(0)	(0)
Kuesioner yang kembali	43	43
Kuesioner yang diolah	43	43
Tingkat pengembalian	100%	100%

Sumber : Pengolahan Data Primer

Berdasarkan kuesioner yang diolah dapat diketahui data demografi responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 6. Data Jenis Kelamin Responden

Jabatan	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
PPKD	Laki-laki	19	44,18
	Perempuan	24	55,82
Total		43	100
Pegawai Akuntansi BKD	Laki-Laki	0	0
	Perempuan	1	100
Total		1	100

Sumber : Pengolahan Data Primer

Tabel 6 menunjukkan bahwa responden PPKD sebanyak 24 orang atau 55.82 % berjenis kelamin perempuan dan responden laki-laki hanya berjumlah 19 orang atau 44.18 % dari total responden PPKD sebanyak 43 responden. Sedangkan pegawai akuntansi BKD sebagai pemeriksa laporan keuangan OPD berjenis kelamin perempuan.

Data demografi responden berdasarkan usia ditunjukkan dalam tabel 7 berikut ini:

Tabel 7. Usia Responden

Jabatan	Usia (tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
PPKD	36 – 45	11	25,58
	46 – 55	31	72,09
	56 – 65	1	2,33
Total		43	100

Pegawai Akuntansi BKD	36 – 45	1	100
	46 – 55	0	0
	56 – 65	0	0
Total		1	100

Sumber : Pengolahan Data Primer

Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai akuntansi BKD berada di kelompok usia antara 36 – 45 tahun. Sedangkan bagi pejabat pengelola keuangan daerah OPD, sebagian besar responden berusia antara 46 – 55 tahun, yaitu sebanyak 31 orang atau sebesar 72.09 %, sebanyak 11 orang berusia antara 36 – 45 tahun, dan 1 orang berada diantara usia 46 – 55 tahun dari total responden PPKD sebanyak 43 responden.

Pendidikan terakhir responden bervariasi dari SMA hingga Strata 2. Berikut jabarannya:

Tabel 8. Pendidikan Terakhir Responden

Jabatan	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
PPKD	SMA	2	4,65
	S1	19	44,18
	S2	22	51,17
Total		43	100
Pegawai Akuntansi BKD	SMA	0	0
	S1	0	0
	S2	1	100
Total		1	100

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2018

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa pejabat pengelola keuangan daerah sebagai penyusun laporan keuangan OPD lebih banyak bergelar S2 yaitu sebanyak 22 responden atau sekitar 51.17 % dibandingkan dengan responden yang bergelar S1 yaitu hanya 19 responden atau sebesar 44.18 % dan lulusan SMA sebanyak 2 responden dari total 43 responden PPKD. Sedangkan pendidikan terakhir pegawai akuntansi BKD adalah S2.

Bidang pendidikan pada saat menempuh sekolah dikelompokkan menjadi 2, yaitu bidang akuntansi dan bidang non akuntansi.

Tabel 9. Bidang Pendidikan Responden

Jabatan	Jurusan	Frekuensi	Persentase (%)
PPKD	bidang akuntansi	11	25,58
	bidang non akuntansi	32	74,42
Total		43	100
Pegawai Akuntansi BKD	bidang akuntansi	1	100
	bidang non akuntansi	0	0
Total		1	100

Sumber : Pengolahan Data Primer

Dari data demografi responden tersebut, menunjukkan bahwa pendidikan terakhir pegawai akuntansi BKD adalah lulusan bidang akuntansi dan jumlah pejabat pengelola keuangan daerah yang merupakan lulusan bidang akuntansi adalah sebanyak 11 orang atau 25,58 % dari 43 responden PPKD.

Jangka waktu bekerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah juga bervariasi dan dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1 hingga 5 tahun dan 6 hingga 10 tahun.

Tabel 10. Lama Bekerja Responden

Jabatan	Lama Bekerja (tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
PPKD	1 – 5	26	60,47
	6 – 10	17	39,53
Total		43	100
Pegawai Akuntansi BKD	1 – 5	0	0
	6 – 10	1	100
Total		1	100

Sumber : Pengolahan Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel di atas, pegawai akuntansi memiliki rentang waktu lama bekerja antara 6 – 10 tahun. Sedangkan dari total responden PPKD sebanyak 43, responden yang memiliki masa lama bekerja yaitu antara 1 – 5 tahun yaitu sebanyak 26 responden dan antara 6 – 10 tahun adalah sebanyak 17 orang. Ini menunjukkan bahwa responden memiliki pengalaman bekerja yang masih relatif singkat dalam pekerjaan khususnya yang terkait dengan proses pelaporan laporan keuangan dikarenakan sering terjadi mutasi susunan kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

Setelah mengetahui data demografi responden, dilakukan deskripsi secara statistik atas hasil penyebaran kuesioner. Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran tentang karakteristik variabel penelitian, antara lain, nilai minimum, nilai maksimum, mean atau nilai rata-rata dan standar deviasi dari data penelitian yang diperoleh. Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Komitmen Organisasi (KO), Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KNDL). Hasil statistik deskriptif pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Mean
SDM	43	25	48	35,77
KO	43	21	45	34,09
SAKD	43	26	40	33,56
SPIP	43	22	50	35,06
KNDL	43	16	29	22,74
Valid N (listwise)	43			

Sumber : Output SPSS 22.0

Tabel 11 menjelaskan bahwa pada variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jumlah 10 butir pertanyaan memiliki nilai jawaban minimum sebesar 25 yaitu dalam kriteria sangat tidak setuju hingga netral. Nilai maksimum adalah 48 terletak kriteria setuju dan sangat setuju. Rata-rata total jawaban adalah 35,77 pada kriteria netral dan setuju.

Variabel Komitmen Organisasi (KO) terdiri dari 9 butir pertanyaan memiliki jawaban minimum sebesar 21 dalam kriteria sangat tidak setuju hingga netral. Nilai maksimum adalah

45 pada kriteria setuju dan sangat setuju. Nilai mean sebesar 34,09 berarti bahwa responden rata-rata menjawab netral.

Jawaban responden terhadap variabel Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki nilai minimum sebesar 26 berkisar antara jawaban tidak setuju dan netral. Nilai maksimum sebesar 40 terletak pada kriteria setuju sedangkan nilai mean sebesar 33,56 pada jawaban netral dan setuju, yang artinya rata-rata responden menjawab netral dan setuju. Butir pertanyaan dalam kuesioner untuk variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah adalah 10 butir.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan 10 butir pertanyaan memiliki nilai minimum sebesar 22 dengan jawaban responden sangat tidak setuju hingga netral. Nilai maksimum adalah 50 terletak pada jawaban sangat setuju. Nilai mean variabel sistem pengendalian internal pemerintah adalah 35,60 artinya rata-rata responden menjawab pada kisaran kriteria netral dan setuju.

Nilai minimum untuk variabel dependen Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (KNDL) adalah 16 dengan jawaban responden antara kriteria tidak setuju dan netral. Nilai maksimum sebesar 29 dengan jawaban berkisar antara netral hingga sangat setuju. Nilai mean 22,74 berarti secara rata-rata jawaban responden terletak dalam kisaran kriteria setuju dan sangat setuju.

Hasil standar deviasi kelima variabel lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean). Hal ini berarti bahwa jawaban responden atas keseluruhan variabel cenderung homogen atau tidak bervariasi.

Tahap kedua yang dilakukan yaitu melakukan uji korelasi Rank Spearman. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel independen yaitu kapasitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah dengan variabel dependen yaitu keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari uji *Spearman's Correlation* penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12. Hasil Korelasi Rank Spearman

Variabel	Koefisien Korelasi	Intepretasi
SDM	-0,099	Tidak ada korelasi
KO	0,605	Korelasi Kuat
SAKD	0,450	Korelasi Sedang
SPIP	0,531	Korelasi Sedang

*Intepretasi dicocokkan dengan kriteria dalam tabel 2

Sumber : Output SPSS 22.0, 2018

Hasil korelasi rank spearman menunjukkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia (SDM) tidak memiliki korelasi dengan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah (KNDL). Hasil korelasi ini kemudian dikonfirmasi dengan uji hipotesis melalui regresi linear berganda berdasarkan model yang telah dibangun dan diperoleh hasil:

Tabel 13. Hasil Regresi Linier Berganda

	B	Sig
Konstanta	3,158	0,436
SDM	-0,011	0,866
KO	0,204	0,003
SAKD	0,231	0,006
SPIP	0,148	0,022

Sumber : Output SPSS 22.0

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan regresi linier berganda pada tabel 13, diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi untuk variabel kapasitas sumber daya manusia (SDM) adalah sebesar 0,866 lebih besar dari *level of significant* = 0.05. Artinya kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel komitmen organisasi (KO), pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah (SKAD), dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan arah beta positif. Temuan ini berarti ketiga variabel independen ini memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian regresi linear berganda ini selaras dengan hasil korelasi rank spearman. Variabel kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ditemukan tidak berhubungan dengan variabel keandalan laporan keuangan pemerintah daerah juga ditemukan tidak memiliki pengaruh. Sedangkan ketiga variabel independen lain yang berkorelasi dengan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah juga ditemukan memiliki pengaruh. Berdasarkan hasil regresi linear berganda disimpulkan bahwa hipotesis 1 tidak terdukung, sedangkan hipotesis 2, 3, dan 4 terdukung.

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kapasitas sumber daya manusia terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan jawaban dari responden penelitian, terdapat beberapa hal yang menyebabkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena kondisi kapasitas sumber daya manusia yang belum mendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualifikasi, hasil pengumpulan jawaban responden menunjukkan banyak PPKD tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang menyatakan tidak setuju dengan pertanyaan no 1 tentang staf sub bagian akuntansi merupakan lulusan D3 akuntansi atau lebih tinggi, yang berarti bahwa staf sub bagian akuntansi tidak harus berlatar belakang jurusan akuntansi. Disamping itu, uraian tugas dan fungsi bagian akuntansi yang masih belum terspesifikasi dengan jelas dan kurangnya sumber daya pendukung operasional yang cukup. Selain itu, adanya pendampingan oleh pegawai bagian akuntansi kepada PPKD dalam menyusun laporan keuangan OPD dapat mengurangi kesalahan dalam bekerja tanpa memperhatikan keahlian PPKD itu sendiri.

Selain kedua hal tersebut, dari sisi kuantitas, masih sedikit jumlah pegawai yang berpendidikan akuntansi. Dari data demografi responden penelitian (tabel 9) menyatakan bahwa pejabat pengelola keuangan daerah yang merupakan lulusan akuntansi hanya 25,58 % dari total keseluruhan responden PPKD dari 43 OPD tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian bahwa latar pendidikan sumber daya manusia bagian akuntansi tidak mempengaruhi dalam pembuatan laporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti (2012) yang menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sudiarianti (2015) yang menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Hal ini menandakan bahwa komitmen organisasi mampu menunjang peningkatan kualitas informasi laporan keuangan. Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden dapat diketahui bahwa pejabat pengelola keuangan daerah OPD Kabupaten Karanganyar memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap masa depan instansi, bekerja di atas batas normal dan sesuai dengan prosedur dan standar instansi pemerintahan, serta selalu bersungguh-sungguh, teliti dan tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. Dengan demikian, pejabat pengelola keuangan daerah tersebut telah memiliki tingkat komitmen organisasi yang tinggi, kesadaran serta keinginan untuk memberikan kontribusi dalam menyajikan laporan keuangan yang andal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Maksyur (2015) dimana komitmen organisasi yang dilakukan pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Indragiri Hulu terbukti berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan yaitu ketepatan waktu dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa pegawai PPKD pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Karanganyar memiliki pemahaman yang tinggi atas sistem akuntansi keuangan daerah sehingga dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang andal. Selain itu, dengan adanya fasilitas sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan dan dirancang khusus untuk proses penyusunan laporan keuangan dapat mempermudah pegawai PPKD dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi apabila orang tersebut mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) OPD Kabupaten Karanganyar sangat memahami sistem akuntansi keuangan daerah sehingga mampu menjelaskan dan menyusun proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi keuangan serta pelaporan keuangan dan mengurangi tingkat kesalahan dalam bekerja.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Syahrida (2011) bahwa pengaruh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja OPD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang memperoleh hasil bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja OPD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu hasil penelitian yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Safrida (2010) yang menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Banda Aceh.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis keempat menunjukkan adanya pengaruh positif antara sistem pengendalian internal pemerintah terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan jawaban responden, sistem pengendalian internal pemerintah Kabupaten Karanganyar telah dilakukan dengan baik. Sudah adanya contoh dari pimpinan untuk

berperilaku etis, pembagian tugas dan jabatan terstruktur dengan baik serta pengawasan kinerja secara independen dan terus menerus. Sistem pengendalian intern yang dilaksanakan secara optimal dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, akan memberikan keyakinan memadai atas tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Sudiarianti (2014) dan Syarifudin (2014) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD, artinya semakin efektif sistem pengendalian intern maka semakin baik kualitas LKPD.

E. KESIMPULAN

Hasil pengujian dan pembahasan dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa sumber daya manusia berperan dalam mendukung dalam menciptakan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah terutama dalam hal komitmen organisasi, pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan metode wawancara langsung pada setiap responden dalam upaya mengumpulkan data dan menggali informasi lebih mendalam, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner.

REFERENCE

- Andini dan Yusrawati. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 1 Vol. 24 No. 1
- Arif, Rahman. 2017. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi dan Kejelasan Tujuan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang Panjang)*. Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat
- Damayanti, Indah Ayu. 2016. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ikhsan, Arfan dan Ishak, Muhammad. 2008. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kaulan, Wahyu. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah pada Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara*. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado.
- Maksyur, N.V. 2015. *Pengaruh Kualitas SDM, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas LKPD*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNRI.
- Nordiawan, D dan Hertianti, A. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.
- Pagalung, Gagaring. 2008. *Agency Theory dalam Pemerintahan Daerah*.
- Permadi, Angga Dwi. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat)*. Jurnal Universitas Widyatama, Bandung

- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Sudiarianti, Ni Made. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.
- Sugiyono. 2015. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Triyanto, Haerul. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Peran Inspektorat Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*.
- Zalni, Fitri. 2013. *Pengaruh Komitmen Karyawan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Study Empiris pada DPKD Pemerintah Kota di Sumatera Barat)*. Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat.